



Siap Ambil Alih Hotel Ibis dan Mal Malioboro

Kerja Sama PT YIS Berakhir,
Pemprov Sewakan Tiap 5 Tahun

JOGJA, Radar Jogja - Pemprov DIJ tengah ancap-ancang mengambil alih pengelolaan Hotel Ibis dan Mal Malioboro. Pengambila-

lian itu dilakukan menyusul berakhirnya kerja sama dengan PT Yogya Indah Sejahtera (YIS) sebagai pengelola Hotel Ibis dan Mal Malioboro. Kerja sama berlangsung selama 30 tahun, tepatnya sejak 1992 silam. Nota kerja sama ditandatangani di masa Gubernur DIJ Paku Alam VIII. ▶ *Baca Siap... Hal 3*



SUDAH 30 TAHUN: Pengunjung berjalan di depan Mal Malioboro, Jogja (13/6). Pemprov DIJ ancap-ancang mengambil alih pengelolaan Mal Malioboro dan Hotel Ibis, menyusul berakhirnya kerja sama dengan PT Yogya Indah Sejahtera (YIS), September 2022.

Siap Ambil Alih Hotel Ibis dan Mal Malioboro

Sambungan dari hal 1

"Kerja sama berakhir September 2022 ini," ujar Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Badan Pengelolaan Keua-

ngan dan Aset (BPKA) DJI Endrawati Utami kemarin (14/6). Menurut Endra, sapaan akrabnya, kerja sama pengelolaan Hotel Ibis dan Mal Malioboro memakai pola *build operate transfer*

(BOT), atau sistem bangun guna serah. Awal kerja sama Pemprov menyediakan lahan. Sedangkan PT YIS yang merencanakan hotel dan pusat perbelanjaan. Konsekuensinya PT YIS punya

hak mengelola hotel dan mal selama 30 tahun. Hotel Ibis berada di Jalan Perwakilan, sedangkan Mal Malioboro di Jalan Malioboro. Akta perjanjian kerja sama nomor 53 tanggal 12 September 1992

berbunyi kontrak bagi tempat usaha dan kontrak bagi keuntungan. Perjanjian mengalami addendum nomor 665.2/3076 tanggal 8 Desember 1993. Kemudian diadakan perubahan lagi dengan perjanjian nomor 199/KPTS/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

Endra menjelaskan, dengan berakhirnya kerja sama dengan PT YIS itu, pola pengelolaan Hotel Ibis dan Mal Malioboro berubah. Masa pengelolaan tidak lagi berlangsung 30 tahun. Namun hanya berlaku selama 5 tahun. "Polanya adalah sewa. Nanti kami melang secara terbuka," katanya.

Disinggung soal kans PT YIS sebagai pengelola lama diprioritaskan, mantan auditor BPK ini tidak menjawab secara langsung. Dia mengatakan, regulasi yang berlaku saat ini tidak memungkinkan. "Kerja samanya bukan lagi BOT. Syaratnya harus ikut lelang kalau ingin menjadi penyewa," ujar birokrat yang tinggal di Ambarketawang, Gamping, Sleman, ini.

Informasi bakal berakhirnya kerja sama pengelolaan Hotel Ibis dan Mal Malioboro kali pertama disampaikan Endra saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DJI pada Rabu (8/6) lalu. Saat itu agendanya membahas laporan kinerja PT Anindya Mitra Internasional (AMI) dan PT Taru Mar-

tani. Keduanya adalah badan usaha milik daerah (BUMD) di bawah Pemprov yang pembinaannya dilakukan BAKD BPKA DJI.

Meski telah siap menerima penyerahan Hotel Ibis dan Mal Malioboro, alumnus STIE YKPN itu mengungkapkan adanya sejumlah persoalan. Di antaranya, *tenant* atau penyewa Mal Malioboro yang kontrak dengan PT YIS yang masa berlakunya berakhir setelah September 2022. Atas kejadian itu Endra mengatakan, solusinya kontrak tetap dilanjutkan. Kemudian diperbarui dengan pengelola yang baru.

Kesiapan menerima pengelolaan Mal Malioboro juga disampaikan Direktur Utama PT AMI Dyah Puspitasari. Di depan anggota parlemen, Dyah mengatakan PT YIS bukan hanya menjalankan perjanjian dengan Pemprov. Namun juga dengan PT AMI.

Menurut Dyah, Mal Malioboro merupakan bagian dari unit pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut.

"Kami siap mengoptimalkan dan mengembangkan semua aset, termasuk yang ada di Mal Malioboro," janjinya.

Anggota Komisi B DPRD DJI Rb. Dwi Wahyu Budiantoro meminta agar penyerahan kembali Hotel Ibis dan Mal Malioboro dari

PT YIS ke Pemprov harus diawasi. Perimbangannya, keduanya merupakan aset yang cukup strategis. "Jangan sampai setelah diserahkan ada temuan. Harus dengan prinsip kehati-hatian dan patuh regulasi," pintanya.

Karena itu, Dwi mendesak dibentuk panitia khusus (pansus) pengawasan terhadap penyerahan Hotel Ibis dan Mal Malioboro. Pansus dinilai penting agar dewan mengetahui apa saja aset berikut nilainya yang diterima Pemprov. "Pansus dapat memanggil siapa saja pihak yang dianggap perlu memberikan penjelasan ke dewan," tegas Dwi.

Wakil Ketua Komisi B Suwardi tidak keberatan dengan rencana pembentukan Pansus Hotel Ibis dan Mal Malioboro. Hanya saja, dia ingin karena bentuknya pansus pengawasan, maka yang diawasi adalah kinerja BUMD. "Itu menjadi bagian saja," kata Suwardi.

Terpisah, Kepala Bidang Anggaran Pendapatan BPKA DJI Gamal Suwanto menginformasikan, Pemprov memperoleh pendapatan dari kerja sama dengan PT YIS. Selama dua tahun terakhir, 2020 dan 2021 setoran ke kas daerah mencapai Rp 1,8 miliar. "Itu bersumber dari Hotel Ibis dan Mal Malioboro," jelas alumnus FH UNS Surakarta ini. (kus/laz/lj)

DI JANTUNG KOTA: Dengan berakhirnya kerja sama, pola pengelolaan Hotel Ibis dan Mal Malioboro pun berubah. Masa pengelolaan tidak lagi 30 tahun, namun hanya berlaku selama lima tahun.



ELIAN KHARISMA DEWANGGANDAR/JOLIA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005